

LAPORAN AKHIR TAHUN



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat-Nya, Penyusunan Laporan Akhir Tahun Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017 telah selesai dilaksanakan .

Laporan ini berisikan uraian Gambaran umum SKPD, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi serta Realisasi Program/Kegiatan serta Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu hingga terlaksananya penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

Tanjung Selor, 20 Desember 2017

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

ttd

Ir. H. Syahrullah Mursalin, M.P.

Pembina Utama Muda (IV/c)

Nip. 19691103 199403 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Akhir Tahun ini dibuat sebagai salah satu pemenuhan kewajiban Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan. Dalam rangka memasuki awal tahun anggaran yang baru, maka perlu dilakukan penyusunan Laporan Akhir Tahun secara sistematis.

1.1. Maksud dan Tujuan

Pembuatan Laporan Akhir Tahun ini dimaksudkan sebagai salah satu pemenuhan kewajiban setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait pelaksanaan program/kegiatan dalam tahun anggaran. Laporan akhir tahun ini memuat program/kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai wujud pertanggungjawaban Kepala Organisasi Perangkat Daerah, di dalam laporan ini memuat Realisasi Program dan Kegiatan baik fisik maupun keuangan, Capaian Kinerja, Permasalahan dan tindak lanjut serta dokumentasi kegiatan.

Tujuan Laporan Akhir Tahun ini adalah sebagai bahan evaluasi agar dalam pelaksanaan tahun selanjutnya dapat dilakukan perbaikan dan percepatan pelaksanaan program/kegiatan.

BAB II

GAMBARAN UMUM SKPD

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

2.1.1 Tugas Pokok

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dan Urusan Pemerintahan Bidang Layanan Pengeadaan Secara Elektronik yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

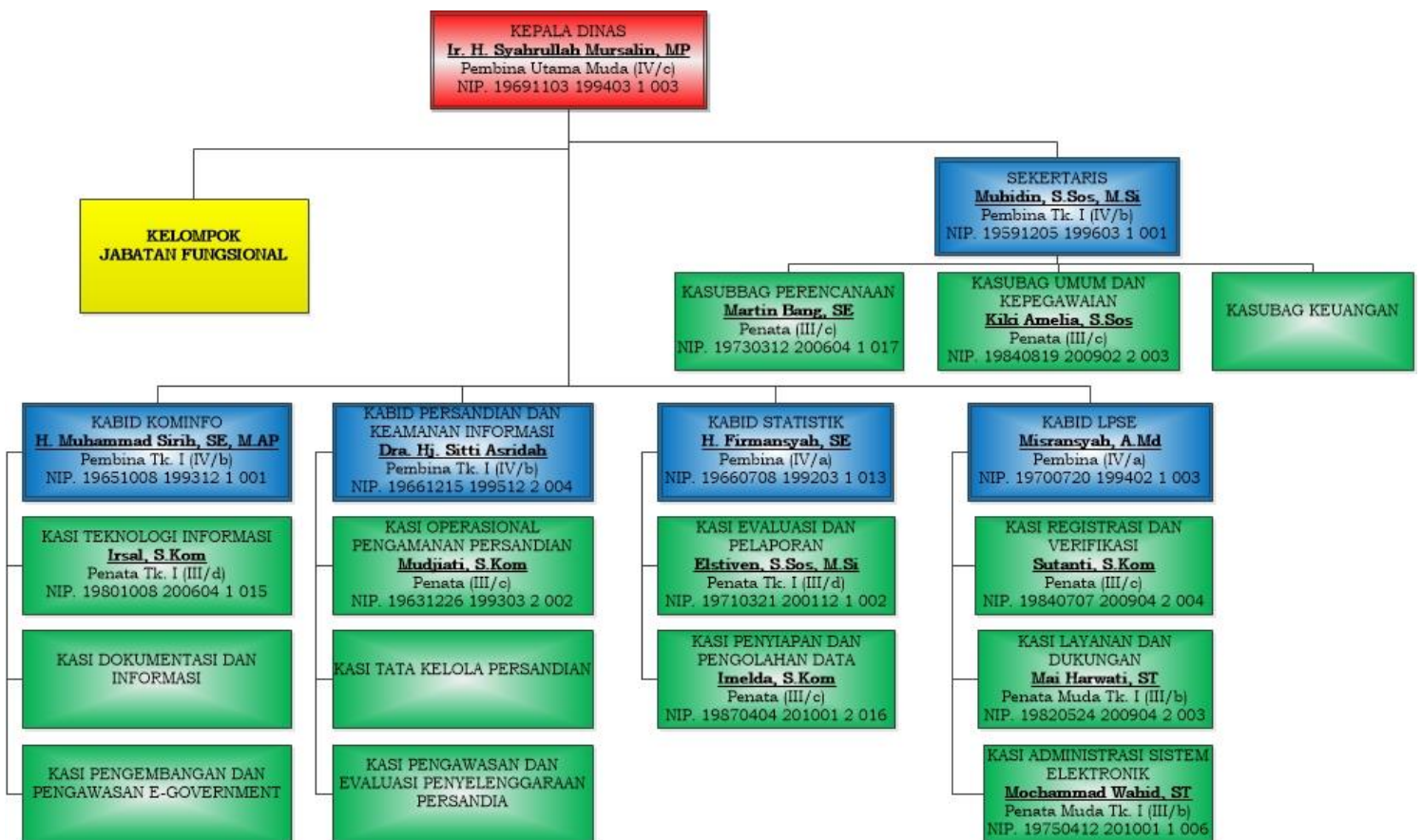
2.1.2 Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Rencana Strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Aplikasi Informatika;
- d. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Statistik Sektoral;
- e. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis Persandian untuk Pengamanan Informasi;
- f. Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan;
- g. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
- h. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional dan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya,

2.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Pasal 49 Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi

2.2. Sumber Daya SKPD

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya Sumber Daya Aparatur yang merupakan mesin penggerak jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Komposisi pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	
		L	P
1	SMA/SMK	00	01
2	Sarjana Muda (D-III)	04	01
3	Sarjana (S1/D-IV)	09	08
4	Pasca Sarjana (S-2)	04	00
	Jumlah	17	10
	TOTAL	27	

Sumber : Database Sub.Bagian Umum Diskominfo Prov. Kaltara Tahun 2017

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah	
		L	P
1	I/a Juru Muda	00	00
2	I/b Juru Muda Tk. I	00	00
3	I/c Juru	00	00
4	I/d Juru Tk. I	00	00
5	II/a Pengatur Muda	00	00
6	II/b Pengatur Muda Tk. I	00	00
7	II/c Pengatur	04	02
8	II/d Pengatur Tk. I	00	00
9	III/a Penata Muda	02	02
10	III/b Penata Muda Tk. I	01	01
11	III/c Penata	01	04
12	III/d Penata Tk. I	04	00
13	IV/a Pembina	02	00
14	IV/b Pembina Tk. I	02	01
15	IV/c Pembina Utama Muda	01	00
16	IV/d Pembina Utama Madya	00	00
	Jumlah	17	10
	TOTAL	27	

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Struktural dan Fungsional	Jumlah	
		L	P
1	Eselon II	01	00
2	Eselon III	04	01
3	Eselon IV	04	05
	Jumlah	09	06
	TOTAL	15	

Sumber : Database Sub.Bagian Umum Diskominfo Prov. Kaltara Tahun 2017

Tabel 2.4.
Komposisi Tenaga Kontrak

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	
		L	P
1	SLTA	02	02
2	D-III/ D-IV	01	00
3	S-1	08	02
4	S-2	00	00
	Jumlah	11	04
	TOTAL	15	

Sumber : Database Sub.Bagian Umum Diskominfo Prov. Kaltara Tahun 2017

Tabel 2.5
Komposisi Pegawai Berdasarkan Penempatan

No	Struktural dan Fungsional	L	P
1	Kadis Kominfo Prov. Kaltara	01	00
2	Sekretaris	01	00
a	Sub Bagian Perencanaan Program	01	00
b	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	00	01
c	Sub Bagian Keuangan	00	00
3	Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika	01	00
a	Seksi Teknologi Informasi	01	00

b	Seksi Dokumentasi dan Informatika	00	00
c	Seksi Pengembangan dan Pengawasan E-Government	00	00
4	Kepala Bidang LPSE	01	00
a	Seksi Administrasi Sistem Elektronik	01	00
b	Seksi Registrasi dan Verifikasi	00	01
c	Seksi Layanan dan Dukungan	00	01
5	Kepala Bidang Statistik	01	00
a	Seksi Penyiapan dan Pengolahan Data	00	01
b	Seksi Evaluasi dan Pelaporan Statistik	01	00
6	Kepala Bidang Persandian	00	01
a	Seksi Tata Kelola Persandian	00	00
b	Seksi Operasional Pengamanan Persandian	00	01
c	Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian	00	00
	Jumlah	09	06
	TOTAL	15	

Sumber : Database Sub.Bagian Umum Diskominfo Prov. Kaltara Tahun 2017

2.2.2 Sarana dan Prasarana Kantor

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa gedung kantor, kendaraan dinas, inventarisasi dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian besar dalam kondisi baik dan beberapa dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Tabel 2.6**Komposisi Kendaraan Dinas/Operasional**

No	JENIS KENDARAAN	MEREK	NOPOL	TAHUN
	RODA EMPAT			
1	Mobil	Toyota Kijang Innova	KU 32 B	2017
2	Mobil	Toyota Avanza Veloz	KU 1011 B	2017
3	Mobil	Toyota Avanza Veloz	KU 1012 B	2017
	RODA DUA			
4	Motor	Honda Vario 150	KU 2238 AA	2017
5	Motor	Honda Vario 150	KU 2239 AA	2017
6	Motor	Honda Vario 150	KU 2240 AA	2017
7	Motor	Honda Vario 150	KU 2241 AA	2017
8	Motor	Honda Vario 150	KU 2242 AA	2017
9	Motor	Honda Vario 150	KU 2243 AA	2017

Sumber : Database Sub. Bagian Umum Diskominfo Prov. Kaltara Tahun 2017

Tabel 2.7**PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR**

No	TANGGAL TERIMA	BARANG	UNIT	KETERANGAN
1	03/04/2017	Mesin Fax Panasonic KX-FP701CX	1	
2	10/04/2017	Laptop Lenoco Thinkpad Edge E470	1	
3	10/04/2017	PC Lenovo Ideacentre Slim 23"	1	
4	10/04/2017	PC Asus Vivo V230ICGT-BF108X OHB All-in-One	1	
5	10/04/2017	Laptop HP Business Probook 430 G4	2	
6	10/04/2017	Printer Brother MFC-J3720 Ink Benefit	1	
7	10/04/2017	PC HP All in One PC 24-g026d	2	
8	10/04/2017	Elektronik Typewriter Nakajima AX 150	1	
9	13/04/2017	Rangka Lemari Besi	1	

10	21/04/2017	Back-UPS, UPS (APC BX650LI-MS)	2	
11	21/04/2017	Epson Printer (L 385)	1	
12	25/04/2017	Laptop HP Business ProBook 430 G4	5	
13	25/04/2017	Penghancur Kertas Secure Maxi 25 SCM	1	
14	25/04/2017	Printer Canon Pixma (G1000)	1	
15	26/04/2017	UPS (BX1100LI-MS)	5	
16	26/04/2017	Cable Power for UPS (B-Save AC Power Cord 1,8 M)	5	
17	26/04/2017	Inverter Prolink IPS 2400	1	

Tabel 2.8
TABEL ALOKASI ANGGARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017

No	PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (APBD)
	BELANJA LANGSUNG	
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.800.064.000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.900.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	450.000.000
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.755.000
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	10.800.000
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	891.000.000
6	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	65.844.000
7	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	39.000.000
8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	154.250.000
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.200.000
10	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.475.000
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.470.000

12	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	6.120.000
13	Penyediaan makanan dan minuman	45.250.000
14	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	650.000.000
15	Rapat-Rapat Kooridnasi, Pembinaan dan Pengawasan di Dalam Daerah	400.000.000
B	Program Peningkatan Ssarana dan Prasarana Aparatur	1.294.335.050
1	Pengedaan kendaraan Dinas/Operasional	667.335.000
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	259.000.050
3	Penyewaan Rumah/Gedung.Gudang Parkiran Kantor Dinas	175.000.000
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	193.000.000
C	Progeam Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	180.036.000
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	180.036.000
D	Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4.600.000
1	Penyusunan Pealporan Keuangan Akhir Tahun	4.600.000
E	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	6.586.078.246
1	Pembinaan dan Pengembangan Sumer Daya Komunikasi dan Informasi	875.400.000
2	Pengadaan alat studio dan komunikasi	264.300.000
3	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	4.866.428.246
4	Monitoring, Evaluasi, Pengawasan dan Pembinaan Persandian	169.000.000
5	Operasional Pengamanan Persandian	51.000.000
6	Sosialisasi Keamanan Informasi dan Operasional	177.400.000
7	Rapat Koordinasi Bidang Persandian	182.550.000
F	Program Kerjasama dengan Mas Media	1.540.800.000
1	Penyebearluasan Informasi Pembangunan Daerah	1.116.000.000

2	Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	150.800.000
3	Partisipasi pada Pameran/Expo/Pekan Kebudayaan	274.000.000
G	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap layalanan Publik	339.999.950
1	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa/ Diklat jurnalistik / Kegiatan PPID / Software Administrasi	320.600.300
2	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik	19.399.650
3	Pengolahan, Updating dan Analisis Data Statistik Daerah	0
H	Program Peningkatan Layanan Pengadaan	5.453.000.000
1	Pengelolaan dan Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4.232.647.500
2	Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	657.680.000
3	Rapat Koordinasi Bidang LPSE	562.672.500
I	Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statisitk Daerah	796.050.000
1	Penyebaran Informasi Statistik Sektoral	330.500.000
2	Pengembangan dan Pembinaan SDM Bidang Statistik	4656.550.000
J	Program Persandian untuk Pengamanan Informasi	180.000.000
1	Bimtek Persandian	180.000.000
JUMLAH		19.174.963.246

BAB III

EVALUASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Realisasi Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan implementasi dari Renja yang telah disusun pada tahun sebelumnya. Namun pada kenyataannya, terdapat beberapa perbedaan antara Renja dan Implementasi Program dan Kegiatan yang dijalankan. Hal ini dikarenakan penyusunan Renja tahun 2017 dengan kondisi penyesuaian beberapa bidang yang tergabung antara lain Statistik, Persandian dan LPSE. Beberapa kegiatan tidak dapat diakomodir mengingat terbatasnya anggaran sehingga dilakukan pemilihan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prioritas penunjang utama perwujudan visi dan misi Kepala Daerah.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi di lapangan. Permasalahan tersebut dapat memberi pelajaran dan sebagai bahan evaluasi agar pelaksanaan kegiatan kedepannya Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2017 disajikan pada tabel 3.1.

TABEL 3.1
Realisasi Program dan Kegiatan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	KEUANGAN		SISA ANGGARAN (RP)
			KEUANGAN (RP)	KEUANGAN (%)	
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	23.316.103.545,00	13.103.460.696,00	56,20	9.236.592.849,00
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.141.140.299,00	3.097.268.836,00	74,79	1.043.871.463,00
	BELANJA LANGSUNG	19.174.963.246,00	10.006.191.860,00	52,18	8.192.721.386,00
2.10 . 2.10.1 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.800.064.000,00	2.195.867.708,00	78,42	604.196.292,00
2.10 . 2.10.1 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	12.900.000,00	9.471.000,00	73,42	3.429.000,00
2.10 . 2.10.1 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	450.000.000,00	387.923.752,00	86,21	62.076.248,00
2.10 . 2.10.1 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan pelengkapan kantor	15.755.000,00	12.120.000,00	76,93	3.635.000,00
2.10 . 2.10.1 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	10.800.000,00	3.480.700,00	32,23	7.319.300,00
2.10 . 2.10.1 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	891.000.000,00	538.915.029,00	60,48	352.084.971,00
2.10 . 2.10.1 . 01 . 08	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	65.844.000,00	34.089.672,00	51,77	31.754.328,00
2.10 . 2.10.1 . 01 . 09	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kantor	39.000.000,00	2.600.000,00	6,67	36.400.000,00
2.10 . 2.10.1 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	154.250.000,00	118.219.500,00	76,64	36.030.500,00
2.10 . 2.10.1 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	41.200.000,00	24.188.750,00	58,71	17.011.250,00
2.10 . 2.10.1 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.475.000,00	3.244.000,00	38,28	5.231.000,00

2.10 . 2.10.1 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	9.470.000,00	7.188.200,00	75,90	2.281.800,00
2.10 . 2.10.1 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.120.000,00	5.057.312,00	82,64	1.062.688,00
2.10 . 2.10.1 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	45.250.000,00	22.215.468,00	49,09	23.034.532,00
2.10 . 2.10.1 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	650.000.000,00	642.840.798,00	98,90	7.159.202,00
2.10 . 2.10.1 . 01 . 19	Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan Di Dalam Daerah	400.000.000,00	384.313.527,00	96,08	15.686.473,00
2.10 . 2.10.1 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.294.335.050,00	426.089.647,00	32,92	868.245.403,00
2.10 . 2.10.1 . 02 . 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	667.335.000,00	-	-	667.335.000,00
2.10 . 2.10.1 . 02 . 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	259.000.050,00	152.732.428,00	58,97	106.267.622,00
2.10 . 2.10.1 . 02 . 11	Penyewaan rumah/gedung gudang parkir kantor dinas	175.000.000,00	174.000.000,00	99,43	1.000.000,00
2.10 . 2.10.1 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	193.000.000,00	99.357.219,00	51,48	93.642.781,00
2.10 . 2.10.1 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	180.036.000,00	140.957.579,00	78,29	39.078.421,00
2.10 . 2.10.1 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	180.036.000,00	140.957.579,00	78,29	39.078.421,00
2.10 . 2.10.1 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4.600.000,00	-	-	4.600.000,00
2.10 . 2.10.1 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	4.600.000,00	-	-	4.600.000,00
2.10 . 2.10.1 . 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	6.586.078.246,00	1.817.045.994,00	27,59	4.769.032.252,00
2.10 . 2.10.1 . 15 . 03	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	875.400.000,00	431.637.578,00	49,31	443.762.422,00
2.10 . 2.10.1 . 15 . 04	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	264.300.000,00	10.801.827,00	4,09	253.498.173,00
2.10 . 2.10.1 . 15 . 06	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	4.866.428.246,00	991.585.224,00	20,38	3.874.843.022,00
2.10 . 2.10.1 . 15 . 14	Monitoring, evaluasi, pengawasan dan pembinaan persandian	169.000.000,00	77.408.638,00	45,80	91.591.362,00
2.10 . 2.10.1 . 15 . 15	Operasional pengamanan persandian	51.000.000,00	39.481.334,00	77,41	11.518.666,00

2.10 . 2.10.1 . 15 . 16	Sosialisasi keamanan informasi dan operasional	177.400.000,00	125.408.082,00	70,69	51.991.918,00
2.10 . 2.10.1 . 15 . 17	Rapat Koordinasi bidang persandian	182.550.000,00	140.723.311,00	77,09	41.826.689,00
2.10 . 2.10.1 . 18	Program kerjasama informasi dengan mas media	1.540.800.000,00	1.008.766.556,00	65,47	532.033.444,00
2.10 . 2.10.1 . 18 . 01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	1.116.000.000,00	897.430.653,00	80,41	218.569.347,00
2.10 . 2.10.1 . 18 . 03	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	150.800.000,00	111.216.853,00	73,75	39.583.147,00
2.10 . 2.10.1 . 18 . 04	Partisipasi Pada Pameran/Expo/Pekan Kebudayaan	274.000.000,00	119.050,00	0,04	273.880.950,00
2.10 . 2.10.1 . 20	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	339.999.950,00	231.489.470,00	68,09	108.510.480,00
2.10 . 2.10.1 . 20 . 01	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa / Diklat Jurnalistik / Kegiatan PPID / Software Administrasi	320.600.300,00	212.089.820,00	66,15	108.510.480,00
2.10 . 2.10.1 . 20 . 02	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik	19.399.650,00	19.399.650,00	100,00	-
2.10 . 2.10.1 . 20 . 03	Pengolahan, Updating dan Analisis Data Statistik Daerah	-	-	-	-
2.10 . 2.10.1 . 21	Program Peningkatan Layanan Pengadaan	5.453.000.000,00	4.185.974.906,00	76,76	1.267.025.094,00
2.10 . 2.10.1 . 21 . 01	Pengelolaan dan Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4.232.647.500,00	3.695.985.441,00	87,32	536.662.059,00
2.10 . 2.10.1 . 21 . 02	Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	657.680.000,00	195.640.570,00	29,75	462.039.430,00
2.10 . 2.10.1 . 21 . 03	Rapat Koordinasi Bidang LPSE	562.672.500,00	294.348.895,00	52,31	268.323.605,00
2.10 . 2.10.1 . 22	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	796.050.000,00	435.754.598,00	54,74	360.295.402,00
2.10 . 2.10.1 . 22 . 01	Penyebaran Informasi Statistik Sektoral	330.500.000,00	190.092.780,00	57,52	140.407.220,00
2.10 . 2.10.1 . 22 . 02	Pengembangan dan Pembinaan SDM Bidang Statistik	465.550.000,00	245.661.818,00	52,77	219.888.182,00
2.10 . 2.10.1 . 23	Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi	180.000.000,00	136.854.083,00	76,03	43.145.917,00
2.10 . 2.10.1 . 23 . 01	Bimtek Persandian	180.000.000,00	136.854.083,00	76,03	43.145.917,00

JUMLAH		23.316.103.545,00	13.103.460.696,00	56,20
				9.236.592.849,00

3.2 Capaian Kinerja

Capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika disampaikan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kominfo dengan Gubernur Kalimantan Utara. Untuk Perjanjian Kinerja disampaikan sebagaimana terlampir, adapun target kinerja Kepala SKPD disajikan pada tabel 3.2

TABEL 3.2

TAEGET KINERJA KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara	80 %	72 %	57,6 %
Total Capaian Kinerja Sampai Dengan Akhir Tahun					57,6%

3.3 Capaian Program Kegiatan

Capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tentunya diharapkan memiliki manfaat yang baik untuk meningkatkan kinerja aparatur ataupun bagi masyarakat. Gambaran capaian program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara hingga akhir tahun anggaran 2017 disampaikan pada tabel 3.3.

TABEL 3.3

LAPORAN CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN HINGGA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017

No.	PROGRAM/KEGIATAN	NILAI KONTRAK (Rp)	HASIL (KELUARAN) KEGIATAN s/d 31 DESEMBER 2017	MANFAAT PROGRAM/KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal	-	<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti Diklat dan ujian sertifikasi Barang/Jasa Pemerintah di Diponegoro Smart Solution Yogyakarta sebanyak 3 (tiga) orang selama 6 (enam) hari. - Mengikuti Ujian Sertifikasi Barang/Jasa di LKPP Jakarta sebanyak 2 (dua) orang selama 3 (tiga) hari. - Mengikuti Diklat dan Ujian Sertifikasi Barang/Jasa dan di Pusat Studi Kebijakan Nasional Jakarta sebanyak 2 (dua) orang selama 6 (enam) hari. 	<p>Untuk memperoleh Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa</p> <p>Untuk memperoleh Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa</p> <p>Untuk memperoleh Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa</p>	<p>Lulus 1 (satu) orang</p> <p>Lulus 1 (satu) orang</p> <p>Lulus 1 (satu) orang</p> <p>-</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti Bimtek Kehumasan Kalimantan Utara 2017 di Tarakan sebanyak 2 (dua) orang selama 3 (tiga) hari. - Mengikuti Bimtek bendahara mahir pajak dan penatausahaan keuangan berbasis SIMDA di Balikpapan sebanyak 1 (satu) orang selama 4 (empat) hari. 	<p>Untuk meningkatkan citra Pemerintah terkait penanganan hoax</p> <p>Pemahaman mengenai perhitungan pajak, potongan pajak pribadi PNS dan pelaporan pajak setiap bulannya</p>	-
			<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti Bencmarking ke Best Practice dalam rangka kegiatan Diklat PIM IV angkatan pertama Provinsi Kalimantan Utara ke Kabupaten Banyuwangi sebanyak 2 (dua) orang selama 5 (lima) hari. - Mengikuti Bimtek Perencanaan dan penganggaran di Tarakan sebanyak 1 (satu) orang selama 7 (tujuh) hari. 	<p>Peserta Diklat mampu merancang pengembangan potensi diri untuk melakukan inovasi terkait pengelolaan tugas dan fungsi organisasi lain ke unit Instansinya.</p> <p>Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur dalam rangka penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD</p>	-

			- Mengikuti Bimtek Statistik Sektoral di Jakarta sebanyak 1 (satu) orang selama 5 (lima) hari.	Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan statistik sektoral	-
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	590.669.000	- Tersedianya kendaraan dinas roda-4 - Tersedianya kendaraan dinas Roda-2	Untuk memenuhi kebutuhan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhi total 6 (enam) unit
3.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	- Terlaksananya penggandaan dan penjilidan	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	-
4	Monitoring, evaluasi, pengawasan dan pembinaan persandian		Tersedianya data laporan hasil monitoring dan evaluasi	Mengetahui kondisi terkini berkenaan dengan Kelembagaan, perencanaan anggaran dan program, SDM, sarana dan prasarana serta hambatan dan kendala yang terjadi pada	

				Penyelenggaraan persandian di Kab. / Kota.	
5	Operasional pengamanan persandian		Tersedianya peralatan operasional peralatan persandian	Mendukung operasional penyelenggaraan persandian	
6	Sosialisasi keamanan informasi dan operasional		Terselenggaranya kegiatan sosialisasi	Memberikan sosialisasi, pengetahuan, pemahaman dan informasi terkait persandian dan keamanan informasi pada peserta sosialisasi untuk mengelola informasi milik pemerintah daerah di era digital dan era cyber ini serta meningkatkan kesadaran pengamanan guna melindungi informasi milik pemerintah daerah.	
7	Rapat koordinasi bidang persandian		Terselenggaranya rapat koordinasi	Tersusunnya rencana strategis dan sinkronisasi program serta pelaksanaan kegiatan Bidang Persandian se-Provinsi Kalimantan Utara	
8	Bimtek persandian		Terselenggaranya bimtek	Meningkatkan pemahaman akan pentingnya nilai informasi milik pemerintah daerah dan meningkatkan pengetahuan tentang tata cara penetapan	

				informasi berklasifikasi milik pemerintah daerah.	
9	Pengelolaan dan Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2.508.815.000	Website LPSE Kalimantan Utara dapat diakses 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu dan 12 bulan dalam setahun	Website LPSE Provinsi Kalimantan Utara memberikan kemudahan dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik bagi pokja/ULP, Penyedia, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP) dan juga bermanfaat bagi penyedia barang/jasa yang akan mengikuti lelang secara elektronik.	
10.	Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	80.300.000	<p>Terlaksana dan selesai pelatihan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Perencanaan, Monev Pengadaan dan Daftar Hitam 2. Pelatihan SPSE Versi 4 Penyedia 3. Pelatihan SPSE Versi 4 dan SIKaP bagi non penyedia 4. Pelatihan Aplikasi SiRUP Bagi SKPD 	Memberikan sosialisasi dan pelatihan, pengetahuan dan informasi serta meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia bagi Penyedia dan non Penyedia, khususnya dalam lingkup Provinsi Kalimantan Utara di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui proses lelang secara elektronik termasuk dalam hal perencanaan sampai dengan pemilihan penyedia melalui e-katalog	

11.	Rapat Koordinasi Bidang LPSE	112.156.000	Rapat Koordinasi LPSE se-Kalimantan Utara telah dilaksanakan 2 (dua) kali	Memotivasi LPSE Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara untuk percepatan penggunaan SPSE Versi 4 dan percepatan penerapan standarisasi LPSE:2014 yang menjadi SOP bagi LPSE serta menjadi wadah untuk saling bersilaturahmi dan bertukar pengalaman, selain itu juga tak kalah pentingnya sebagai salah satu sarana peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki LPSE.	
12.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa / Diklat Jurnalistik / Kegiatan PPID / Software Administrasi	Rp240.000.000,00	Penyediaan Domain Email Kalimantan Utara	Memudahkan pengguna internet di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam mengakses email dan mempermudah mengingat alamat email tersebut.	
13.	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Rp5.526.000.000	Perencanaan pembangunan menara Telekomunikasi di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara , yaitu Desa Mangkupadi, Sekatak Bengara, Desa Kerubir, SMK Tridaya	Pengembangan Infrastruktur telekomunikasi akan membantu akses informasi yang lebih cepat dan sebaran informasi yang lebih merata	

14.	Pengadaan alat studio dan komunikasi	Rp. 264.300.000	Penyediaan perangkat peliputan berupa kamera, camcoder, tripod beserta aksesoris dan alat-alat pendukungnya	Pelayanan penyediaan informasi publik lebih maksimal dengan dukungan alat dokumentasi informasi yang sesuai kebutuhan.	
15.	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kominfo		Pelaksanaan Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara	Pembentukan Komisi Informasi sebagai wadah pendukung terlaksananya keterbukaan informasi di wilayah Kalimantan Utara	

3.4 Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut

Beberapa permasalahan yang ditemui selama pelaksanaan program/kegiatan serta Rencana Tindak Lanjut pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara disampaikan pada tabel 3.4.

TABEL 3.4

PERMASALAHAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

No.	Program/Kegiatan	Permasalahan	Tindak Lanjut
1.	Monitoring, evaluasi, pengawasan dan pembinaan persandian	Tidak terdapat pemasalahan dalam pelaksanaan kegiatan	
2.	Operasional pengamanan persandian	Tidak terlaksananya pengadaan peralatan jaringan - Pengadaan Alat Jammer GSM/CDMA/WIFI karena belum ditemukan sesuai standar spesifikasi barang dari Lembaga Sandi Negara	Menganggarkan pada tahun anggaran 2018 untuk mengajukan belanja modal pengadaan alat-alat sandi dan perlengkapan kamar sandi dengan melakukan koordinasi dan konsultasi sebelumnya terkait spesifikasi alat yang sesuai standar dengan Lembaga Sandi Negara
3.	Sosialisasi keamanan informasi dan operasional	Pada saat pelaksanaan kegiatan sosialisasi, peserta yang hadir dari kab./kota yang diundang hanya berasal dari Kab. Tanjung Selor dan Kota Tarakan. Pejabat / staf persandian dari Kab. Nunukan, Kab. Tana Tidung dan Kab. Malinau tidak dapat hadir dikarenakan tidak memiliki anggaran	Menganggarkan pada tahun anggaran 2018 untuk mengajukan belanja transportasi dan akomodasi untuk peserta pejabat / staf persandian dari kab./kota yang diundang

4.	Rapat koordinasi bidang persandian	Kegiatan telah terlaksana tanpa ada permasalahan yang terjadi	
5.	Bimtek persandian	Kegiatan telah terlaksana tanpa ada permasalahan yang terjadi	
6.	Pengelolaan dan Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pada kegiatan pengelolaan operasional LPSE, permasalahan pada tidak terlaksananya Lelang Sertifikat ISO 27001 dan ISO 9001 dikarenakan waktu yang tidak mencukupi	Belanja Sertifikat ISO 27001 dan ISO 9001 akan dianggarkan kembali di Tahun Anggaran 2018
7.	Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Sosialisasi Perencanaan, Monev Pengadaan dan Daftar Hitam dan Bimbingan Teknis/Pelatihan telah selesai dilaksanakan, namun untuk pelaksanaannya masih perlu dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali	Bimtek/pelatihan bagi penyedia dan non-penyedia serta Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan dilaksanakan di tahun 2018 . Untuk Tahun 2018, akan dicoba untuk pelatihan bagi penyedia dan non-penyedia akan lebih sering diadakan, guna peningkatan sumber daya manusia khususnya dibidang pengadaan barang/jasa Pemerintah
8.	Rapat Koordinasi Bidang LPSE	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang LPSE se-Kalimantan Utara, tidak mengalami permasalahan yang berarti, hanya masih memerlukan lebih banyak koordinasi kepada LPSE	Untuk pelaksanaan Rakor LPSE berikutnya, akan lebih ditekankan untuk koordinasi, agar terjalin sinergitas dan selaras bagi LPSE Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara. Selain koordinasi dalam pencapaian SOP

		Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara	Standarisasi LPSE:2014 juga koordinasi dalam memaksimalkan pelayanan dibidang pengadaan barang/jasa secara elektronik dan juga peningkatan sumber daya manusia khususnya bagi Tim LPSE Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara
9.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa / Diklat Jurnalistik / Kegiatan PPID / Software Adminstrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai opd yang baru terbentuk masih dalam tahap pembelajaran dan sosialisasi pada beberapa kegiatan seperti PPID dan Pengembangan E-Government	Aktif dalam mengikuti sosialisai/bimtek yang berkenaan dengan pelayanan publik, dan penambahan jumlah staf/ operator yang kompeten dalam menangani bidang tersebut
10.	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Tidak terdapat masalah dalam realisasi kegiatan	Mempertahankan capaian realisasi kegiatan yang telah sesuai standar.
11.	Pengadaan alat studio dan komunikasi	Pengadaan alat dianggarkan pada anggaran perubahan sehingga beberapa kegiatan pendokumentasian kegiatan tidak dapat terlaksana maksimal	Tetap melaksanakan kegiatan pendokumentasian kegiatan dengan sumber daya yang tersedia
12.	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kominfo	Tertundanya seleksi calon anggota komisi informasi	Berkoordinasi cepat dan cermat agar terlaksananya seleksi secara transparan dan profesional

Secara garis besar, beberapa permasalahan yang dihadapi pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai SKPD yang baru terbentuk, Renstra Diskominfo perlu dilakukan review dan evaluasi mengingat Renstra sebelumnya merupakan bagian dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- b. Beberapa Program dan Kegiatan yang penganggaran tidak sesuai dengan Renja dikarenakan penyusunan Renja Tahun 2017 dilakukan dengan kondisi Bidang Layanan Pengadaan Secara Elektronik tidak tergabung didalamnya.
- c. Sesuai dengan penganggaran tahun 2017, telah dilakukan efisiensi anggaran sehingga beberapa program dan kegiatan disesuaikan tingkat prioritas.
- d. Kurangnya ketersediaan aparatur dalam penyusunan program/kegiatan.
- e. Kurangnya pemahaman aparatur dalam penyusunan perencanaan program/kegiatan dan penganggaran sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena yang tertuang dalam DPA tidak sesuai dengan kondisi yang ada saat ini.
- f. Proses pencairan dana mengalami keterlambatan karena lambatnya pemberkasan untuk pencairan anggaran.
- g. Terdapat kegiatan yang belum/tidak dapat dilaksanakan karena menunggu aturan baku atau merupakan kewenangan pusat.
- h. Terdapat beberapa kegiatan yang rencananya akan dirasionalisasi dikarenakan menurut pandangan tidak akan terealisasi sehingga akan dilakukan penyesuaian pada perancangan APBD-P Tahun Anggaran 2017.

Sedangkan untuk tindak lanjut secara garis besar adalah sebagai berikut:

- a. Menambah jumlah aparatur yang berkompeten dalam penyusunan program/kegiatan.
- b. Mengikutsertakan aparatur penyusun program/kegiatan, dalam Diklat yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran.
- c. Mengoptimalkan peran pengelola keuangan dalam proses pencairan dana.
- d. Merasionalisasikan anggaran pada kegiatan yang dimungkinkan tidak dapat berjalan sebagai akibat belum adanya keputusan dari Pemerintah Pusat dan meninjau ulang/mengganti indikator kegiatan (*output*, target, dan *outcome*) dan kelompok sasaran agar kegiatan tersebut dapat terlaksana pada APBD-P.

BAB IV

KESIMPULAN

Laporan Akhir Tahun Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017 ini merupakan laporan yang disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun sesuai dengan rencana strategis guna mewujudkan visi dan misi kepala daerah dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara.

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran agar kedepan jika ditemukan permasalahan yang sama supaya dapat ditindak lanjuti secara cepat dan cermat.

Akhirnya dengan terususunnya Laporan Akhir Tahun Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017 agar dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 – 2021 yaitu *“Berpada dalam Kemajemukan untuk Mewujudkan Kaltara 2021 yang Mandiri, Aman dan Damai, dengan Didukung Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa”*.